

**Jurnal Sejarah.** Vol. 1(2), 2018: 84 – 102

© Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

ANDREW/I0.26639/js.v1i2.75

# **Membentuk Citra, Menegaskan Identitas: Kehidupan Para Pelajar-Perantau Batak di Batavia (1907-1945)**

**Teguh V. Andrew**

Peneliti Pusat Studi Sejarah dan Masyarakat Urban

andrewmanurung@gmail.com

## **Abstract**

This research aims to elaborate the role of Western education which in a short time transformed the ethnic Batak from an isolated group and backward ethnic groups into modern urban society. This study is about the lives of Batak migrant in the beginning of the 20th century up to World War II. During that period, the Batak people were trying to shape the image as an educated group with the purpose of dismantling negative stereotypes that labeled Batak society while they also aligning themselves with students from other ethnic group who have formed a new layer of urban society and actively involved in national movement. Through the establishment of various ethnic-based organizations, Batak students did not just create the medium of activism of the struggle for their strategic interests, but they also asserted cultural identity which been deliberately hidden. Nevertheless, as shown in this research, those tendencies resulted into the dissolution of the established solidarity among Batak students and immediately replaced it by creating a more specific and tight criteria that lead into the denial of their cultural identity since it is considered to have been dominated by Batak-Toba ethnic group.

Keywords : Urban Society, Educated Group, Students Activity, National Movement, Cultural Identity.

... kalau Batak praktis *nggak* pernah mengalami kerajaan. Itulah yang mengherankan : peradaban mereka rendah, tapi begitu pencerahan masuk *nggak* lebih dari seratus tahun seluruh kantor dikuasai orang Batak.  
(Pramoedya Ananta Toer dalam Sirait, Hindriyati P, dan Rheinhardt, 2011 : 126)

## **Pendahuluan**

Sapai pertengahan abad ke-19, masyarakat Batak praktis tidak memiliki hubungan yang intens dengan kelompok-kelompok etnik lain, terutama yang bermukim di daerah pesisir pantai Timur pulau Sumatera. Selain isolasi alam yang menyebabkan akses ke pusat Tanah Batak sangat sulit dilakukan, mitos-mitos dikembangkan berbagai pihak untuk kepentingan niaga menjadi penyebab utamanya. Namun sejak beberapa kelompok zending yang hendak menyebarkan agama Kristen Protestan, terutama Rheinische Missions Gesellschaft (RMG) berhasil menembus hutan lebat dan lereng gunung curam yang mengitari *bona pasogit* pada pertengahan dan akhir abad ke-19, dalam waktu singkat kelompok etnik ini mengalami kemajuan pesat. Persentuhan dengan pendidikan Barat moderen yang berkelindan dengan hasrat untuk mengejar kemajuan (*hamajuon*) menjadi kata kunci untuk memahami akselerasi peralihan etnis Batak-Toba dari masyarakat tradisonal ke masyarakat moderen. Segera setelah pemerintah kolonial Belanda menganeksasi tanah Batak dengan membangun berbagai infrastruktur, termasuk jaringan jalan raya yang menghubungkannya dengan Sumatera Timur, sejak awal abad ke-20 kaum terpelajar Batak-Toba mulai bergerak ke luar tanah Batak menuju kawasan perkebunan swasta, bahkan kemudian menuju kota-kota kolonial di pulau Jawa, seperti Batavia.

Ibukota Hindia-Belanda, menjadi salah satu pilihan destinasi karena dalam kurun waktu yang sama telah menunjukkan karakteristik kota sebagai sebuah teater urban berupa sekumpulan situs yang merefleksikan kompleksitas hubungan global/lokal yang saling saling bertemu, berkelindaan, dan menghasilkan keragaman ruang dan bentuk kultural, politik, ekonomi, dan sosial (Nas, 2005 :1 ; Bridge dan Sophie, 2003 :1). Salah satu elemen yang menonjol adalah struktur sosial masyarakat Batavia yang heterogen. Sejak masih berwujud kota benteng pada abad ke-17, Batavia telah mengikuti tipologi Henri Lefebvre (2003 :1) ihwal masyarakat kota yang dibentuk oleh kaum pendatang. Walhasil, seperti tipikal kota-kota kolonial di Asia, Ibukota Hindia-Belanda ini, memiliki karakter masyarakat multi-ras yang terdiri dari golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera (Pauker, 1977: 20 dalam Dutt dan Naghun, 1994:162). Walaupun pemerintah kolonial menciptakan penggolongan masyarakat kolonial berdasarkan ras dan memisahkan permukiman kaum Bumiputera dalam kampung-kampung berbasis etnis, bukan berarti interaksi antar suku bangsa di Batavia tidak terjadi. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan Lance Castles (1967: 159, 161), beberapa kelompok etnis tinggal di kampung yang sama. Selain itu, untuk suatu

kepentingan, seorang kepala kampung dapat dipilih dari luar etnis yang merepresentasikan kawasan permukiman tertentu (Castles, 1967:161). Penduduk golongan pribumi di Batavia juga menyerap berbagai elemen kultural dari berbagai kelompok etnis. Sebagian di antaranya bahkan kehilangan ikatan dengan tradisi leluhurnya dan membentuk suku bangsa baru yang menyokong budaya hibrida.

Kecenderungan interaksi antar etnis di kawasan perkotaan di berbagai belahan dunia—termasuk di Batavia—yang menyokong Teori Urbanisasi tradisional dan Modernisasi ihwal meleapnya etnisitas yang membuat individu-individu menjadi terisolasi, sekuler, merusak sistem kekerabatan, menciptakan interaksi sosial bersifat impersonal, dangkal, dan pragmatis, serta membentuk kelas baru dan identitas nasional dalam sebuah negara-bangsa moderen (Bruner, 1961 : 508 ; Hutchison, 2007 : x). Namun, seperti yang ditunjukkan antropolog Edward M. Bruner, tren itu tidak berlaku pada kota-kota di Asia. Ia menyebut kaum urban Batak-Toba pada satu sisi lebih maju dan kosmopolitan, namun di sudut yang lain tradisionalisme tetap menjadi pondasi kehidupan sosial yang identik dengan keseharian di kampung halaman (Bruner, 1961 :508). Mengikuti pemikiran itu, artikel ini tidak saja berupaya mengamati arus kedatangan kaum migran Batak di Batavia pada akhir masa kolonial, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka membentuk citra sebagai golongan Bumiputera terpelajar yang tidak saja untuk memupus stereotip negatif yang disematkan, tetapi juga membangun hubungan yang egaliter dengan kelompok-kelompok etnis lain dalam konteks pergerakan nasional, dan menegaskan identitas etnis dalam masyarakat urban Batavia yang multikultur.

### **Menggapai Kemajuan Melalui Pendidikan Moderen**

Persentuhan budaya Barat dan kelompok etnik Batak-Toba yang mulai terjalin sejak pertengahan abad ke-19 memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Kehadiran agama Kristen yang dibawa oleh zending RMG menjadi pondasi baru budaya Batak yang sempat mengalami disorientasi akibat ekspansi Kaum Paderi (1821-1837) di bagian selatan Tanah Batak. Selain itu, jaringan transportasi yang dibangun oleh Pemerintah Hindia-Belanda untuk menghubungkan pantai Barat dan Timur Sumatera melalui pedalaman Tanah Batak telah membuka isolasi dan mempermudah mobilitas dari dan menuju wilayah tersebut. Walhasil, dalam waktu singkat masyarakat Batak Toba tidak lagi hidup secara tradisional dan tersolasi, tetapi telah menjelma menjadi masyarakat moderen yang terbuka pada nilai-nilai baru.

Namun pada sisi yang lain persentuhan masyarakat Batak dengan berbagai kebudayaan asing itu telah membuka mata ihwal ketertinggalan mereka dalam berbagai hal, jika dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya, terutama mereka yang bermukim di wilayah pesisir. Akan tetapi keadaan itu tak membuat mereka merasa kecut dan menjadi inferior, tetapi malah membangkitkan semangat dan hasrat yang kuat untuk segera mengejar ketertinggalan itu. Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk tujuan itu.

Segera setelah proses kristenisasi berlangsung, sekolah pertama yang dikelola RMG telah berdiri pada 1861. Jumlah itu terus meningkat pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-20.<sup>1</sup> Pada 1914, misalnya, tercatat jumlah sekolah itu telah mencapai 510

---

<sup>1</sup> Menurut St. E. Harahap sekolah tertua yang dikelola zending didirikan pada 1861 di Sipirok. Sampai 1883 telah terdapat 57 sekolah yang dikelola oleh RMG dan menampung sekitar 1.100 murid. Jumlah sekolah semacam ini terus meningkat sejak awal abad ke-20. Kala itu di Tanah Batak telah terdapat 200 sekolah bagi 300.000 murid, suatu jumlah yang besar apabila dikomparasikan dengan jumlah sekolah di seluruh Jawa yang hanya 562 sekolah untuk menampung 28 juta penduduk (Hasselgren, 2008 :108). Pada 1909 jumlah sekolah binaan RMG itu telah mencapai 365 dengan jumlah murid 18.000 orang.

sekolah dengan 32.970 orang murid (Simanjuntak, 2005 :64; Aritonang, 1988: 164-165, 216). Setamat pendidikan dasar, kebanyakan pelajar melanjutkan pendidikan ke sekolah guru dan kateket/seminari, dan kejuruan yang seluruhnya dikelola RMG (Aritonang, 1988 :80-85 ; Hasselgren, 2008 :112) . Di luar itu, mereka juga berstudi di sekolah-sekolah lanjutan<sup>2</sup> milik pemerintah yang mulai berdiri sejak awal abad ke-20 (Simanjuntak, 2005 :63).

Kelompok zending RMG pada awalnya bersikap optimis terhadap pendirian berbagai sekolah pemerintahan di Tanah Batak. Mereka berpandangan sekolah-sekolah yang mereka bina di wilayah pedesaan akan tetap bertahan karena lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah hanya akan didirikan di kota-kota besar dalam Karesidenan Tapanuli. Sikap optimis ini diperkuat pula dengan semakin bertambahnya jumlah sekolah dan murid binaan RMG dari tahun ke tahunnya. Namun sejak memasuki dasawarsa kedua abad ke-20, RMG mulai bersikap pesimis terhadap masa depan sekolah-sekolah yang mereka bina. Perbedaan mendasar antara sekolah binaan RMG dan sekolah pemerintah adalah bahasa pengantar yang dipakai menjadi pangkal persoalan utama. Para zending secara tegas menolak penggunaan bahasa pengantar Melayu<sup>3</sup> dan memilih menggunakan bahasa Batak di sekolah-sekolah yang mereka kelola. Sementara berbagai institusi pendidikan yang dikelola pemerintah sejak awal telah menggunakan bahasa pengantar Melayu, sebuah kualifikasi yang diwajibkan oleh perusahaan-perusahaan swasta ketika merekrut sumber daya manusia (Kozok, 2009 :261). Alasan inilah yang membuat masyarakat Batak mulai melirik sekolah-sekolah pemerintah yang tersebar di Tanah Batak.

Kenyataan ini membuat RMG mulai menggunakan strategi baru agar murid-murid Batak tidak berpaling ke sekolah-sekolah pemerintah. Bahasa Melayu sebenarnya telah diajarkan di Semari Pansurnapitu dan Sipoholon. Selain itu bahasa ini mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Sejak 1914, beberapa sekolah binaan RMG telah mengajarkan bahasa Melayu dan Belanda. Di luar itu, RMG juga mulai mendirikan sekolah-sekolah dasar berbahasa Belanda dan juga sekolah lanjutan (MULO). Beberapa HIS yang dikelola RMG mulai didirikan di Sigompulon (1910), Narumonda (1919), Sibolga, Sipirok, Padangsidempuan, dan Pematang Siantar (1923). Sebuah sekolah di Sidikalang secara khusus didirikan untuk para anak raja. Sementara MULO juga didirikan di Tarutung (1927), Sipirok, dan kemudian Pematang Siantar (Hasselgren, 2008 :111; Aritonang, 1988 :350).

Namun sejak abad ke-20 sebenarnya telah terjadi pergeseran orientasi pendidikan dalam masyarakat Batak. Selain karena kebijakan Politik Etis (1901) dan mengeliatnya perkebunan-perkebunan swasta di Sumatera Timur, virus *Hamajuon* (Kemajuan) yang menjangkiti masyarakat Batak-Toba sejak 1920-an, membuat orientasi bersekolah pun lebih difokuskan kepada hal yang bersifat pragmatis, yaitu mendapatkan pekerjaan. Bila sebelumnya, pekerjaan sebagai guru dan pendeta sangat diminati, namun kini jabatan-jabatan kerah putih, seperti guru, juru ketik, dan pegawai perkebunan yang terutama yang banyak disediakan oleh instansi pemerintah maupun perkebunan swasta yang menawarkan gaji dan pangkat semakin digandrungi

---

<sup>2</sup> Sebenarnya sejak 1883, pemerintah kolonial telah lebih dahulu mendirikan sekolah guru di Padang Sidempuan. Dalam perkembangannya, didirikan pula sekolah berbahasa Melayu (untuk kelas rendah) dan sekolah berbahasa Belanda (untuk kelas tinggi). Untuk anak-anak Bumiputera, pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan *Hollands Inlandsche School* (HIS) di beberapa wilayah, seperti Sigompulon (1911-1936), Narumonda (1919), Sibolga, dan Padang Sidempuan. Di luar itu, pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah lanjutan mulai dari MULO, HIK, AMS, dan HBS (Simanjuntak, 2005 :63).

<sup>3</sup> Pada awalnya penolakan kaum zending terhadap bahasa Melayu disebabkan karena bahasa ini berhubungan erat dengan kebudayaan pesisir Muslim, namun belakangan alasan utama penolakan itu adalah untuk mencegah orang-orang Batak merantau ke luar Tanah Batak yang dikhawatirkan dapat mengikis identitas budaya dan menjauhkan mereka dari agama Kristen (Kozok, 2009 :261).

(Castles, 2001 :53). Pergeseran orientasi pendidikan inilah yang menyebabkan banyak kaum Batak terdidik lulusan sekolah binaan RMG dan sekolah pemerintahan memilih hijrah ke berbagai daerah baik di sekitar maupun sampai ke luar Tanah Batak.

Alasannya, kebanyakan alumnus seminari binaan RMG mengalami kesulitan untuk menembus jabatan-jabatan kerah putih karena kurikulum di sekolah binaan kelompok zending asal Jerman tersebut didominasi mata pelajaran Teologi dan hanya memberikan keterampilan pedagogis. Selain itu, tidak digunakannya bahasa pengantar Belanda dan Melayu di sekolah-sekolah tersebut menjadi penghambat utama pelajar-pelajar Batak-Toba untuk masuk ke dunia kerah putih. Padahal instansi pemerintah dan perkebunan-perkebunan swasta memiliki kecenderungan dalam merekrut pegawai-pegawai yang menguasai ilmu pengetahuan umum dan fasih berbahasa Belanda dan Melayu (Kozok, 2009 :261).

Selain itu, sebagian jabatan kerah putih mensyaratkan kualifikasi pendidikan menengah yang ironisnya pada saat itu belum tersedia di Tanah Batak. Keadaan itu diperburuk lagi oleh isolasi-isolasi yang berporos pada perasaan anti-Batak oleh etnis-etnis lain—seperti Melayu dan Mandailing— dengan cara menciptakan dinasti-dinasti kepegawaian berbasis kesukuan untuk menghambat ekspansi orang-orang Batak ke ranah pekerjaan kerah putih. Kenyataan itulah yang menyebabkan sampai masa akhir kolonial Belanda, kaum terdidik Batak hanya dapat menembus jabatan-jabatan pemerintahan dan menjadi pegawai-pegawai perkebunan di sekitar wilayah Tanah Batak saja (Pelly, 1994 :103).

Namun demikian, hambatan-hambatan ini tidak menyurutkan para pelajar Batak untuk terus berusaha menembus berbagai jabatan kerah putih. Untuk memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, banyak orang tua Batak yang kemudian mengirimkan anak-anaknya ke sekolah lanjutan. Sayangnya, sejak pada awal abad ke-20 di Sumatera hanya terdapat institusi pendidikan semacam itu. Bahkan sampai 1920-an sekolah lanjutan di Tanah Batak sama sekali tidak ada. Oleh karena itu pelajar-pelajar Batak mulai mengarahkan tujuannya ke berbagai pusat pendidikan di Hindia Belanda, terutama kota-kota yang terletak di pulau Jawa. Sebagian mengarahkan pandangannya ke Batavia, Ibukota Hindia-Belanda. Sejak diberlakukannya Politik Etis (1901), kota ini tidak saja berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga pusat pendidikan pendidikan—yang memiliki berbagai jenis institusi pendidikan dasar, menengah dan tinggi—paling lengkap dan bermutu tinggi di tanah jajahan.

### **Para Pelajar-Perantau Batak di Batavia**

Peluang untuk melanjutkan pendidikan di pulau Jawa sebenarnya bermula dari tawaran yang diberikan oleh RMG pada pelajar Batak yang berkecukupan dan/atau cerdas. Namun sebelum abad ke-20, para pelajar Batak ini tidak mengarahkan tujuannya ke Batavia, tetapi ke Depok. Segera setelah menjadi domisili komunitas Kristen yang lebih stabil pada pertengahan abad ke-19, barulah wilayah itu mulai berkembang pesat menjadi pusat perkembangan beberapa lembaga pendidikan Kristen yang cukup penting di Hindia-Belanda (Lombard, 2000 : 96 ; Abineno, 1978 :71 ; Van den End dan Weitjes, 1993 :220). Salah satu yang paling berpengaruh adalah Seminari Depok yang berdiri pada 1878. Walaupun menerima murid dari segala penjuru tanah jajahan, namun sampai akhir abad ke-19 secara keseluruhan populasi pelajar Batak tampak dominan. Sayangnya, setelah beroperasi selama 48 tahun (1878-1926), seminari yang telah meluluskan ratusan pelajar Kristen bumiputera ini ditutup sehingga pelajar Batak mulai mengalihkan tujuannya ke Batavia.

Sejak dasawarsa pertama abad ke-20 orang-orang Batak mulai berdatangan ke Batavia. Sebagian besar adalah pemuda-pemuda yang hendak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah dan kejuruan, walaupun ada segelintir tamatan seminari di Tanah Batak yang nekat mencari pekerjaan ke Batavia. Pada 1907 datang seorang tamatan Seminari Pansur na Pitu, Simon Hasibuan yang kemudian bekerja kepada seorang Belanda, Hinloopen Lambertson di Museum Gedoeng Gajah. (Harahap, t.t.: 43-44). Di luar itu, Hezekiel Manulang dan Pendeta Lumbantobing pun datang ke Batavia karena mendapat tugas pelayanan dari Gereja Methodis (Marpaung, 1974 : 4).

Dua tahun kemudian barulah muncul gelombang pelajar Batak yang pertama bersamaan dengan pembukaan Sekolah Pertukangan (*Ambacht School voor Inlander*) di daerah Kampung Jawa, Batavia. Ketika itu, diperkirakan telah terdapat 20 pelajar Batak yang bersekolah di sana (*Ibid.*, 1974 :4). Salah satunya yang terkenal adalah Friedrich Silaban, seorang arsitek ternama yang banyak merancang berbagai bangunan megah dan bersejarah di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, seperti Monumen Nasional (Monas) dan Masjid Istiqlal (Matondang, 2003 : 30). Setelah kedatangan gelombang yang pertama ini, dari tahun ke tahun, jumlah pelajar-pelajar Batak yang hijrah ke Batavia semakin meningkat. Pada 1912, datang gelombang kedua pelajar-pelajar Batak yang terdiri dari lima orang, yang paling terkenal di antaranya adalah J.K. Panggabean, yang kemudian terkenal sebagai pengusaha Batak-Toba paling sukses pada awal masa kemerdekaan. Tiga tahun kemudian, pada 1915, para pelajar Batak tamatan HIS Sigompulon dan HIS Narumonda (Porsea) telah banyak melanjutkan studi di berbagai institusi pendidikan di Batavia, seperti *Kweekschool* Gunung Sahari, OSVIA, dan juga STOVIA. Selain itu, para pelajar Batak lulusan Sekolah Melayu dan Zending juga datang ke Batavia untuk mencari pekerjaan Beberapa di antaranya kemudian diterima bekerja di Jawatan Topografi, (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :214).

Sebagai wilayah yang masih asing bagi sebagian besar masyarakat Batak, jaminan hidup dan tempat tinggal menjadi faktor lain yang penting untuk menjelaskan peningkatan arus migrasi orang-orang Batak ke Batavia. Beruntung, kala itu, ada seorang Batak yang menawarkan tempat tinggal bagi para pelajar dari Tanah Batak yang ingin melanjutkan sekolah ke Ibukota Hindia-Belanda. Sosok itu adalah Frederick Harahap. Ia mengirimkan pengumuman itu ke majalah mingguan *Surat Keliling Immanuel* yang populer di kalangan masyarakat Batak.

Dalam pemberitaan itu Harahap menulis “*Manang Ise sian hamoe ama manang ina na naong margoroe ianakona toe Betawi, pasikola, mamang panijalani karejo, asa torang diboto hamoe bontanato ahoe ma ibana disoeroe ro. Alamthoe, F. Harahap tinggal di perbatasan Sawah Besar dan Kebun Jeruk, no. 18 Batavia*” (Siapa saja dari Bapak atau Ibu yang hendak memberangkatkan anaknya ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, datanglah ke alamat saya. Alamatku : F. Harahap, tinggal di perbatasan Sawah Besar dan Kebun Jeruk, no. 18 Batavia (Marpaung, 1974 : 4-6 ; Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :215).

Sampai 1917 diperkirakan sudah terdapat 30 orang Batak-Toba, di antaranya lima telah berumah tangga dan sisanya adalah pelajar yang melanjutkan pendidikan di sekolah teknik (*ambachtschool*), dan menjadi perawat di rumah sakit, seperti RS CBZ (sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), RS Cikini, dan RS KPM Petamburan. Sejak 1919 banyak pula orang-orang Batak yang bekerja di berbagai kantor di Batavia. Beberapa di antara mereka bekerja di Bank Tabungan Pos dan berhasil mengesankan sang manajer karena bakat berhitung yang dimiliki oleh pegawai-pegawai Batak tersebut (Castles, 2001 : 258).

Sejak 1920, jumlah pelajar Batak tamatan seminari binaan RMG dan HIS yang melanjutkan pendidikan ke Batavia semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya HIS baru yang didirikan, seperti di Pematang Siantar dan Sibolga. Selain itu dibangunnya MULO

Tarutung dan Pematang Siantar pada 1927 membuat pelajar-pelajar Batak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah tidak harus hijrah ke luar Sumatera. Namun demikian bukan berarti gelombang migrasi pelajar-pelajar Batak ke Batavia menyurut atau bahkan terhenti sama sekali. Pada kenyataannya dominasi pelajar Batak yang datang ke Batavia bukan lagi tamatan HIS, tetapi para alumnus sekolah menengah yang sebagian besar merupakan lulusan MULO Pematang Siantar dan Tarutung. Agar cepat beradaptasi, pada mulanya mereka tinggal bersama kerabat dan kenalan. Namun belakangan sebagian besar memilih mengontrak rumah dan tinggal di asrama<sup>4</sup> (Situmorang, 1981 :51 ; Simatupang, 1991 : 54-55).

Sebagian besar pelajar Batak melanjutkan sekolahnya di salah satu institusi pendidikan menengah terbaik di Hindia-Belanda, yaitu *Christelijke AMS Salemba*. Sekolah ini terletak di kawasan *Orange Boulevard* (Jalan Diponegoro sekarang) di seberang Rumah Sakit Umum Pusat CBZ<sup>5</sup> (*Centraal Burgerlijk Ziekenhuis*). Berdiri pada 1926 dan sekolah ini termasuk AMS bagian B yang mendalami bidang ilmu pasti (Lubis, 2008 : 220). Gedung sekolah *Christelijke AMS Salemba* merupakan gedung yang cukup megah karena merupakan kompleks persekolahan *Christelijke Middelbare School* (CMS) yang mengelola *Hogere Burgerschool* (HBS), gabungan antara MULO dan AMS dengan masa studi lima tahun, *Peдагоogische Middelbare School* (PAMS), sekolah calon guru Eropa dengan waktu studi empat tahun, di samping AMS yang menempuh waktu tiga tahun masa studi.

Mayoritas pelajar AMS adalah orang Belanda, yang secara berimbang terbagi atas totok dan peranakan. Kaum Bumiputera dan Tionghoa menempati porsi yang kecil, kurang lebih delapan siswa dalam setiap kelas. Akan tetapi interaksi antar murid dan guru berjalan lebih egaliter. Suasana itu ditunjukkan misalnya dengan penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi paling umum untuk pergi ke sekolah. Para guru yang mayoritas orang Belanda pun pergi menggunakan kendaraan roda dua ini. Selain itu, para pelajar yang tinggal berjauhan dengan sekolah dapat pula menaiki *trem*. Sementara pengguna mobil hanya terbatas pada kalangan pejabat tinggi, seperti, kepala sekolah.

Walaupun, AMS Salemba termasuk sekolah Kristen<sup>6</sup>, namun bukan berarti semua muridnya beragama Kristen. Golongan pelajar Bumiputera didominasi oleh orang-orang Muslim. Tidak ada perbedaan yang bersifat vertikal (Islam-Kristen) maupun horizontal (Bumiputera-Eropa) dalam kegiatan belajar di ruang kelas. Dominasi eropasentris justru lebih terlihat dalam berbagai mata pelajaran, seperti Sejarah, Geografi, dan Ilmu Sosial lainnya yang merupakan mata pelajaran penting, di samping Matematika, Kimia, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, dan Ilmu Falak sebagai mata pelajaran pokok. Pelajaran bahasa menjadi nilai lebih dari sekolah ini karena setiap murid wajib

<sup>4</sup> Di Batavia, terdapat dua jenis asrama, yaitu yang disediakan oleh sekolah yang bersangkutan ataupun asrama partikelir. Selain asrama yang dikelola oleh beberapa sekolah ternama, terdapat juga asrama yang diusahakan oleh sebuah keluarga tertentu. Bangunan asrama ini tak ubahnya seperti rumah tinggal biasa. Keluarga pemilik rumah menyewakan beberapa kamar untuk satu atau dua orang. Paling banyak asrama partikelir ini diisi oleh 10 orang pelajar (Simatupang, 1991 :55). Sementara itu, bagi pelajar dari kalangan atas yang mendambakan kenyamanan, biasanya menyewa sebuah *pension* (kamar penginapan) pribadi seharga f 15 per bulan (Situmorang, 1981 :51). T.B. Simatupang, misalnya, pada awalnya diperintahkan ayahnya untuk tinggal di rumah sepupu ayahnya yang tinggal di Batavia, yaitu Dominne Siagian. Akan tetapi atas ajakan kakaknya yang telah tinggal di Asrama Zuiderweg selama dua tahun akhirnya T.B. Simatupang mengikuti ajakan kakaknya itu (Simatupang, 1991 : 54-55).

<sup>5</sup> Kompleks sekolah ini berdekatan dengan *Geneeskundige Hogeschool* (sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) dan *Hogere Burgerschool* (HBS) (sekarang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) (Simatupang, 1991 :55,58).

<sup>6</sup> Tidak ada mata pelajaran maupun ujian agama Kristen di AMS, sifat Kristen hanya ditunjukkan pada kebaktian pada hari senin di aula, selebihnya kurikulum sama seperti AMS biasa dan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

menguasai bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman, serta bahasa Perancis sebagai mata pelajaran pilihan (Situmorang, 1981 :56).

Setelah menamatkan AMS, sebagian pelajar Batak yang memutuskan untuk bekerja, namun banyak pula yang melanjutkan pendidikan ke berbagai sekolah tinggi, baik yang tersebar di Batavia maupun di kota-kota besar lainnya di pulau Jawa. Di Ibukota Hindia Belanda, para pelajar Batak tersebar di berbagai sekolah tinggi ternama dan terbaik ketika itu, seperti *Geneeskundige Hogeschool (GHS)*, *Recht Hogeschool (RHS)*, dan *Hoogere Theologische School (HTS)*, yang berdekatan dengan *Christelijke AMS Salemba*. Belakangan juga didirikan *Litteraire Faculteit (Fakultas Sastra)* pada 1940 (Legge,2010 :40).

Beberapa mahasiswa Batak, seperti Johan Nainggolan, T. Loebis, Diapari Siregar (Ketua Jong Batak Bond), Lindo Siregar, S. Siregar, F. Harahap, F.L. Tobing (pernah menjadi Residen Tapanuli, Menteri Penerangan, Menteri Negara, dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah, dan Menteri Urusan Transmigrasi) , dan J.L. Tobing tercatat melanjutkan pendidikannya di GHS (Harahap, t.t. : 44 ; Marpaung, 1974 : 14 ; Simatupang, 1991 :66). Sementara itu, mahasiswa Batak lainnya, seperti A.M. Tambunan, tokoh Parkindo yang pernah menjabat sebagai menteri sosial (1968-1973) dan Amir Syarifuddin yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-2 (1947-1948) memilih melanjutkan studi ke RHS. Sebagian yang lain memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke HTS. Beberapa mahasiswa Batak yang tercatat menempuh pendidikan di lembaga ini adalah S.T.G. Mulia (mahasiswa magister), Ojahan Sihotang, Tunggul Sihombing, Karimunda Sitompul, Paido Sarumpaet, Gustaf Siahaan, dan Andar Lumbantobing (pendiri Gereja Kristen Protestan Indonesia).

Sebagai kaum intelektual, para pelajar dan mahasiswa Batak yang melanjutkan studi di Batavia tidak saja dikenal sebagai sosok yang pandai dan cemerlang di ruang-ruang kelas. Beberapa di antara mereka juga kesohor sebagai tokoh-tokoh pergerakan pemuda yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Sosok-sosok Batak ini selalu hadir sejak awal Periode Pergerakan Nasional sampai akhirnya Proklamasi Kemerdekaan, bahkan Revolusi Fisik. Mereka tidak hanya piawai berkiprah secara individual, tetapi juga secara komunal, melalui berbagai perkumpulan dan organisasi pergerakan yang ada pada saat itu.

### **Kiprah Pelajar Batak dalam Pusaran Pergerakan Nasional**

Kehadiran kaum migran Batak hingga dasawarsa pertama abad ke-20 nyaris tidak dapat diidentifikasi oleh masyarakat dan kelompok perantau lainnya yang bermukim di Batavia. Selain tergolong minoritas<sup>7</sup>, mereka kecenderungan untuk menyembunyikan identitas kulturalnya karena memiliki stereotip di negatif, seperti primitif, kasar, dan kanibal di kalangan masyarakat Bumiputera di Hindia Belanda (Castles, 2001 :137 ; Purba dan Elvis F. Purba : 213-214). Namun, sejak populasi migran Batak Toba kian meningkat<sup>8</sup>, strategi untuk menyembunyikan identitas kultural tidak mungkin lagi dilakukan dan mereka pun mulai berani membuka diri.

---

<sup>7</sup> Secara kuantitatif sangat sulit untuk melacak keberadaan kaum migran Batak yang jumlahnya minim di tengah berbagai kelompok migran yang populasinya terus meningkat dan asal-usulnya semakin beragam. Sampai 1917, tercatat hanya terdapat 30 orang Batak-Toba di Batavia. (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :214)

<sup>8</sup> Peningkatan arus migrasi para pelajar Batak ke Batavia terjadi sepanjang 1911-1916 dan terutama sejak 1919. Setahu berselang (1920) telah terdapat 34 keluarga Batak yang sejak 1917 telah mulai mengadakan kebaktian terbuka berbahasa Batak di salah satu Gereja Methodist di Batavia (Castles, 2002 : 137). Populasi kaum migran Batak pada 1922 telah menjadi 267 orang. Diperkirakan pada akhir dasawarsa ketiga abad ke-20 jumlah mereka telah naik lebih dari dua kali lipat menjadi 625 orang Dalam sensus 1930 dicatat populasi migran Batak yang bermukim di Batavia secara keseluruhan adalah 1.263 orang atau 0,16 % dari populasi penduduk Batavia sebesar 553.015 jiwa (Marpaung, 1974 : 10 ; Castles,2007 :24-25).



Dengan status sebagai pelajar Bumiputera yang sangat dihormati oleh masyarakat Batavia kala itu, mereka berusaha untuk mengubah pandangan buruk tentang manusia Batak. Langkah awal yang diambil oleh para pelajar Batak di Batavia mencatumkan nama marga yang selama ini disembunyikan di belakang nama depan mereka. Selain itu, langkah yang justru lebih efektif dan menjadi ciri gerakan kaum terpelajar pada saat itu adalah dengan membentuk berbagai organisasi yang berbasis etnis di Ibukota Hindia-Belanda, Batavia.

Hal yang menarik, pada mulanya kegemaran bersepakbola menjadi media perekat para pelajar Batak di Batavia. Sejak 1917 telah dibentuk perkumpulan sepakbola bernama *Bataks Voetbal Verenignig* (BVV) dan diketuai oleh Panangian Harahap yang kemudian digantikan oleh J.K. Panggabean. Dalam waktu singkat, BVV menjadi klub sepakbola yang disegani. Beberapa pesepakbola Batak, seperti D. Hutagalung, S. Siregar, dan Hisar yang berjudul “Si Singapoer” segera mencuri perhatian penonton sepakbola di Batavia (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :217 ; Marpaung, 1974 : 10). Selain itu, pertandingan sepakbola yang digelar oleh BVV merupakan salah satu wadah untuk memperkenalkan istilah Batak kepada masyarakat luas. Parada Harahap mencatat dalam pertandingan pertama yang digelar oleh BVV, sengaja diletakkan pengumuman di luar dengan mencatumkan kata Batak dalam ukuran yang besar. Pada awalnya para pesepakbola Batak ini harus menutup telinga karena mendapat cemoohan banyak orang. Namun tak lama kemudian, para penonton melihat bahwa orang-orang Batak tak seburuk yang mereka bayangkan. Orang-orang yang selama ini menyamar sebagai orang Padang itu<sup>9</sup> ternyata bersih dan terdidik, bahkan fasih berbahasa Belanda (Castles, 2001 :258).

Dalam perkembangannya, tak hanya hebat di lapangan, BVV dikenal pula sebagai wadah untuk menghimpun orang-orang Batak di Batavia untuk membicarakan perbaikan nasib bersama, dan memperkenalkan orang Batak tidak hanya di Batavia tetapi juga di kota-kota lain di pulau Jawa (Marpaung, 1974 : 10). Kiprah BVV ini, menurut seorang berinisial H.T., mendorong orang-orang Batak untuk keluar dari persembunyiannya (Castles, 2001 :258). Sebagai organisasi Batak pertama, BVV juga berhasil membuat nama Batak yang sebelumnya jarang terdengar dan berkonotasi negatif, kemudian menjadi familiar dan positif di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan itu, dalam *Bintang Batak* ditulis :

Sai roham djala madjoema nian BVV, asa lam tor tandona goarni Batak di Jawa on. Bolan dohonon holan alani BVV mangardjolosahali sombahon tanda goarmi Batak di Batavia on. Ndang be ho lam di Batavia noenga soede di Pulau Jawa on”. (Selamat dan majulah BVV supaya nama Batak semakin terkenal di Jawa ini. Dapat dinyatakan bahwa hanya BVV-lah yang pertama kali membuat nama Batak terkenal di Batavia ini. Tidak hanya di Batavia tetapi di Pulau Jawa (Marpaung,1974 :10-11).

<sup>9</sup> Sebelmnya, seperti , terekam dalam tulisan seorang Batak berinisial H.T. (yang diperkirakan Castles sebagai Hermanus Tambunan ). Pada 1914, dalam *Bintang Batak*, ia mencatat bahwa nama Batak menimbulkan asosiasi yang tidak menguntungkan di kalangan kaum bumiputera di Batavia. Konotasi negatif, seperti jelek, kasar, jorok, dan bodoh membuat orang-orang Batak yang bermukim di Ibukota Hindia-Belanda itu merahasiakan identitas kultural mereka. Untuk itu mereka kerap menyamar sebagai orang Minangkabau (orang Padang) atau orang sebrang. Dalam beberapa kasus, seringkali pula ditemukan orang-orang Batak menyembunyikan nama marga, baik dengan meningkatnya ataupun tidak mencantulkannya sama sekali di belakang nama depan mereka . (Castles, 2001 :137 ; Purba dan Elvis F. Purba : 1998 : 213-214).

Sejak kemunculan BVV, secara berturut-turut muncul berbagai perkumpulan Batak<sup>10</sup> di Batavia. Namun mereka juga menjalin relasi seluas-luasnya dengan berbagai kelompok pelajar dari berbagai wilayah di Nusantara yang menjadi lokomotif dunia pergerakan yang memperjuangkan nasionalisme kaum bumiputera. Seperti para pelajar Jawa yang membentuk Jong Java (1918), pada mulanya para pelajar Batak bergabung dengan pula *Jong Sumatera Bond*<sup>11</sup> (JSB) pada 1917 yang menawarkan slogan “Persatuan Sumatera” (Pringgodigdo, 1991 :24 ; Pelly, 1994 :66). Namun dalam perkembangannya, dominasi pelajar Minangkabau membuat slogan itu memudar sehingga membuat membuat gerah berbagai kelompok pelajar dari etnis lain Para pelajar Batak termasuk kelompok yang sangat vokal menentang, menjadi pihak yang menekan, dan terang-terangan menunjukkan ekspresi negatif terhadap keadaan di dalam JSB (Azahari, 2007 : t.h). Lebih lanjut, Aminoedin Pohan dalam terbitan yang sama secara keras mengkritik dominasi itu:

Siapakah di antara kita yang tidak merasa sedih hingga kini pekerjaan kenasionalan para Pemuda Sumatera hanya dilakukan satu pihak saja, yaitu saudara-saudara kita dari Minangkabau, sedangkan kelompok-kelompok lainnya malu-malu tinggal di belakang terus ? Apakah orang-orang tidak akan menyadari bahwa pemberian penerangan dari satu pihak saja mengenai masalah-masalah Sumatera akan memberikan kesan yang menyesatkan dan mereka yang menaruh minat tertentu akan mendapat gambaran yang salah mengenai masalah ini sehingga mereka yang berkepentingan akan menjadi korban ? (Suwardi, 2007 : 51).

Pada sisi lain, kegundahan terhadap dominasi Minangkabau dalam JSB terjadi karena di kalangan kaum migran Batak di Batavia populasinya semakin meningkatnya populasi kaum migran Batak dan menebalnya kebanggaan terhadap identitas kultural<sup>12</sup> yang selama ini mereka sembunyikan. Kedua hal inilah yang membuat kaum pelajar Batak merasa tak ada gunanya lagi bergabung dalam JSB. Sementara Sanoesi Pane, seorang tokoh Batak yang terkemuka kala itu, berpendapat bahwa sangat mustahil untuk mengharapkan kerjasama antara para pelajar dari Minangkabau dan Batak dalam JSB karena sejarah masyarakat dua suku bangsa yang bermukim di Sumatera ini sangat berjauhan (Suwardi, 2007 : 50-51). Lebih lanjut kegundahan para pelajar Batak berkait dengan motif-motif duniawi karena dalam beberapa tahun terakhir berada dalam situasi yang limbung. Untuk itu, para pemuda Batak ini berusaha untuk mendirikan perhimpunan khas Batak. Hasrat ini setidaknya dilandasi oleh dua aspek. Pertama, orang-orang Batak merasa telah mencapai peradaban yang baik. Kedua, membutuhkan wadah untuk mempertanggungjawabkan perjuangannya dalam hubungan dengan nasionalisme selanjutnya. Dalam perspektif itu, mereka berpandangan perjuangan yang satu tidak meniadakan perjuangan yang lainnya sehingga siapapun yang bergelut dalam dunia pergerakan harus memperhitungkan kebhinekaan budaya (Van Miert 2003 : 476-478).

---

<sup>10</sup>Di kalangan kaum migran dibentuk sebuah organisasi tolong menolong yang mengurus masalah kematian dengan nama Halolongan. Sementara itu, pada 1920 dibentuk pula Batakerssbond, perkumpulan para pelajar Batak Kristen dan Islam yang sempat menerbitkan majalah *Sahala Batak*. (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :217 ; Castles, 2001 :138).

<sup>11</sup> Didirikan oleh para pelajar Sumatera pada tanggal 9 Desember 1917 di Batavia di Gedung Volkslectuur, Weltevreden. (Pringgodigdo, 1991 :25). Beberapa tokoh penting asal Sumatera, seperti Abdoel Moeis, Soetan Toemenggoeng

<sup>12</sup> Fenomena ini telah muncul sejak awal abad ke-20 melalui media massa, berbagai pertemuan, dan tulisan-tulisan tentang Batak. Di ranah pergerakan nasional, kiprah tokoh-tokoh Batak mulai terlihat sejak Tuan Manullang mendirikan Hatopan Kristen Batak (HKB) terinspirasi dari Bodi Oetomo dan bersimpati pada perjuangan Sarekat Islam (SI) (Simanjuntak, 2009 :315 ; Castles, 2001 : 138-140).

Sementara itu, dengan bahasa yang lebih keras, Gindo Siregar menyatakan, kaum pelajar Batak tidak akan pernah bekerjasama dengan para anggota JSB untuk mencapai kebesaran Tanah Air. Oleh karena itu, para pelajar Batak-Angkola memutuskan untuk membentuk organisasi yang otonom dengan nama Jong Batak Bond (JBB) pada 1925 (Perret, 2010 :351). Lebih lanjut ia mengatakan :

Tanpa sedikit mengurangi pentingnya Jong Sumatranen Bond (Persatuan Pemuda Sumatera) sebagai sarana untuk mencapai terbentuknya suatu Sumatera Raya, saya terpaksa meniadakan arti perhimpunan tersebut sebagai suatu organisasi yang dapat menuntun anak-anak Batak kepada kesadaran bahwa sebagai anggota suatu keluarga besar mereka seyogyanya harus bekerjasama dengan anggota-anggota lainnya untuk kebesaran tanah air yang mereka cintai...(Suwardi, 2007 :51).

Berkaitan dengan pembentukan JBB, dalam tulisan bertajuk *Nationalisme* yang dimuat di terbitan yang sama, Sanusi Pane menyebut pembentukan perhimpunan pemuda-pemuda Batak bukan berarti upaya pembongkaran terhadap JSB, namun untuk menumbuhkan persaudaraan dan persatuan orang-orang Sumatera karena , “tiada satu pun di antara kedua pihak berhak mencaci maki pihak lainnya oleh karena dengan demikian berarti bahwa kita menghormati jiwa suatu bangsa yang sedang menunjukkan sikapnya” (Sastrawan Pujangga Baru,2008). Namun, Pane melanjutkan, “sekali memilih dalil bahwa kekuatan suatu bangsa sebagian terdapat dalam kebudayaannya, maka dengan berpikir secara konsekuen kami telah sampai kepada kesimpulan bahwa suatu Jong Batak Bond mempunyai hak untuk berdiri,” (Lumban Gaol, 2015).

Setahun setelah pembentukan JBB, pada 24 Oktober 1926, di Bandung diadakan sebuah pertemuan untuk berbagai persoalan penting berkaitan dengan organisasi pemuda Batak ini. Salah satu hal yang disepakati adalah pembentukan kepengurusan baru<sup>13</sup> (Suwardi, 2007 : 52). Selain itu, dirumuskan pula tujuan dari organisasi pemuda Batak yang mencakup penyediaan wadah bagi para pelajar keturunan Si Raja Batak supaya saling berkenalan, seperasaan, dan seia sekata di dalam memajukan dan mengharumkan nama Batak, memupuk dan melestarikan budaya Batak agar jangan ditinggalkan oleh generasi muda Batak, memupuk persahabatan dengan suku-suku lain yang ada di Nusantara (Marpaung, 1974 : 14). Akhirnya, setelah diadakan pemungutan suara tiga tujuan JBB ini disepakati secara resmi oleh seluruh anggota perkumpulan pelajar Batak itu.

Paska pertemuan di Bandung, hubungan antara JBB dan JSB sempat menegang. Salah satunya terlihat dalam pertemuan yang diorganisasi oleh Jong Java pada 20 Februari 1927 untuk mengagas pembentukan Jong Indonesia yang dihadiri wakil-wakil dari Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Sumatra, Pasudan, Jong Batak, dan Studenten Unie. Pada kesempatan itu diusulkan agar setiap perkumpulan pemuda berhak menjadi anggota Jong Indonesia kelak dibentuk. JSB sendiri mempersoalkan status anggotanya dalam Jong Indonesia yang tidak perlu lagi menyertakan wakil dari JBB karena organisasi ini merepresentasikan penduduk khusus yang bermukim di Sumatera dan pada kenyataannya sebagian anggota JBB juga merupakan tergabung JSB. Menanggapi usulan itu, JBB melihat ketimbang membahas persoalan itu lebih baik

<sup>13</sup> Dalam pertemuan itu disepakati bahwa ketua dan sekretaris perkumpulan ini adalah Diapari Siregar dan Amir Koesin, sementara L.G.L Tobing dan Ali Akbar menjabat sebagai sekretaris. Sementara itu, jabatan bendahara diisi oleh Mahjoedin Loebis. Urusan administrasi diserahkan kepada Merad Tandjoeng dan A. Abbas (Suwardi, 2007 : 52).

mendiskusikan agenda yang lebih penting untuk memajukan kesatuan di antara berbagai perkumpulan pemuda, mengusulkan anggaran organisasi yang akan dibentuk yang memerhatikan dan mewujudkan pandangan kesatuan Indonesia. Sebagai konklusi, JBB berpandangan pekerjaan Jong Indonesia yang akan dibentuk kelak akan sangat berat sehingga pengintegrasian berbagai perkumpulan pemuda yang baru, seperti JBB dan Pasundan berarti membantu penyelesaian pekerjaan yang berat itu (Suwardi, 2007 : 53-54).

Terlepas dari silang pendapat di antara JBB dan JSB, kedua organisasi kepemudaan ini terbukti dapat bekerjasama<sup>14</sup> walaupun masing-masing tetap menjaga jarak. Namun setelah Kongres Pemuda II (1928) kiprah kedua organisasi justru meredup. JBB yang sempat memiliki 9 cabang organisasi ( 5 di Sumatera dan 4 di Jawa), namun persaingan di antara sub-suku Batak menyebabkan organisasi ini terdegradasi dari kancah pergerakan nasional (van Miert, 2003 :478). Perseteruan ini kemudian menjalar ke berbagai organisasi lain yang dibentuk kaum migran Batak di Batavia. Hal itu tidak saja terlihat dalam kasus percerahan organisasi kematian Halolong yang sudah mapan , tetapi juga mendorong pembentukan berbagai perkumpulan baru, seperti Angkola Bond, Mandailingers Bond, Christelijke Studiefonde Toba dan Pardomuan Batak-Toba<sup>15</sup> yang merepresentasikan puak Angkola, Mandailing, dan Toba (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :218 ; Castles, 2001 :138).

### **Menegaskan Identitas Etno-Religius**

Kemunculan berbagai organisasi yang merepresentasikan puak-puak dalam masyarakat Batak menunjukkan identitas bersama yang mereka perjuangkan sejak awal abad ke-20 telah meluntur. Sebagai penggantinya, puak-puak itu kemudian menonjolkan kekhasan budayanya masing-masing. Mereka yang sebelumnya bergaul rapat kini agak menjaga jarak. Bahkan, seperti yang terjadi pula di Medan, puak Mandailing di mulai mengingkari identitas kebatakannya. Sebagai gantinya, mereka menyebut dirinya sebagai suku Mandailing, walaupun secara kultural banyak memiliki kesamaan dengan orang-orang Toba yang mendominasi identitas Batak pada saat itu.

Mewujudnya situasi ini juga disebabkan karena dari tahun ke tahun, orang-orang Toba yang datang ke Batavia terus meningkat. Kenyataan ini terkait dengan proses westernisasi masyarakat Batak-Toba yang terjadi lebih akhir dibandingkan sub-suku Batak lainnya. Walaupun telah bersentuhan dengan dunia luar sejak pertengahan abad ke-19, praktis kultur migrasi ke luar Tanah Batak dalam masyarakat ini baru terjadi sejak Perang Batak berakhir pada 1907. Namun Segera setelah Pemerintah Hindia-Belanda menganeksasi Tanah Batak, orang-orang Batak Toba telah mulai bermigrasi ke wilayah Simalungun sampai perbatasan wilayah Sumatera Timur.

Para pelajar Batak-Toba memiliki jangkauan migrasi yang lebih luas. Ketika kehadiran mereka ditolak di beberapa kota pendidikan di pulau Sumatera, seperti Medan dan Padang, kaum Batak terdidik ini mulai mengalihkan tujuan ke kota pendidikan di pulau Jawa, termasuk Batavia. Namun arus migrasi pelajar Batak pada paruh pertama hingga paruh kedua abad ke-20 berjalan sangat lambat. Baru memasuki dasawarsa ketiga abad XX, arus migrasi orang Batak-Toba semakin meningkat. Bila tren populasi para perantau Batak-Toba yang terus bertahan setiap tahunnya, maka hampir dapat dipastikan, sejak dasawarsa keempat abad ke-20, mereka adalah kelompok terbesar kaum migran Batak di Batavia

---

<sup>14</sup> Dalam kepanitian Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di gedung Indonesische Clubgebouw (Batavia), wakil dari JSB Muhammad Yamin duduk sebagai sekretaris, sementara itu wakil JBB yang juga merupakan ketua organisasi itu, Amir Sjarifuddin menjadi bendahara.

<sup>15</sup> Organisasi ini dibentuk pada 1928, untuk tujuan mempersatukan orang Batak-Toba dan memikirkan nasib mereka sebagai perantau, memupuk adat, menurunkannya, dan memikirkan kemajuan orang Batak-Toba. (Marpaung, 1974 : 15)

Populasi yang besar inilah yang membuat orang-orang Toba menjadi dominan dalam masyarakat Batak di Batavia. Mereka juga mengeser kedudukan orang-orang Mandailing yang sebenarnya datang terlebih dahulu ke Ibukota Hindia-Belanda ini. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim asal-usul suku Batak sesungguhnya berasal dari orang-orang Toba. Klaim itu berdasar dari cerita mitologi yang diterima luas dalam puak-puak Batak lain, ihwal sosok Si Raja Batak yang turun ke Gunung Pusut Buhit yang terletak di Desa Sianjur Mula-Mula, Samosir yang menjadi tempat tinggal orang-orang Toba. Dari sanalah mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah dan membentuk puak-puak lain dalam masyarakat Batak. Dengan dasar itu, orang-orang Toba mulai mendominasi kebudayaan Batak. Hal ini berlaku pula di Batavia. Situasi ini membuat para perantau awal yang berasal dari Angkola dan Mandailing gerah. Benih-benih perpecahan telah tampak sejak awal 1920-an dan memuncak pada 1930-an sehingga puak-puak lain pun mulai menjaga jarak. Pada 1922, misalnya, orang-orang Angkola menolak disebut bagian dari suku Batak karena konsep etnik ini tidak merepresentasikan sebuah bangsa, tetapi agama tertentu. Selain itu, pengingkaran itu pula yang menyebabkan banyak anggota Batakkers Bond dari puak-puak di luar Toba hijrah ke organisasi baru, seperti Angkola dan Mandailing Bond (Perret, 2010 :351). Walaupun ada upaya untuk memperbaiki<sup>16</sup> situasi ini, namun hingga berakhirnya Perang Dunia II, upaya untuk merekatkan kembali solidaritas kaum migran Batak di Batavia tidak maksimal (Marpaung, 1974 : 16). Walhasil hubungan yang di antara mereka lebih harmonis, para perantau Batak tetap tersegmentasi ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing lebih memprioritaskan persatuan dalam kelompok-kelompok daripada solidaritas kaum migran Batak di Batavia secara keseluruhan.

Sebaliknya, kaum migran Batak-Toba pada saat yang bersamaan berupaya untuk menegaskan identitas kultural dengan menciptakan kriteria-kriteria khusus. Salah satunya terlihat dalam pembentukan organisasi keagamaan yang merupakan bagian dari gereja Batak yang dibina oleh RMG dan berpusat di Tarutung. Dalam perkembangannya, Huria Kristen Batak Batavia, nama organisasi itu kemudian, tak hanya berhasil mengonsolidasi orang-orang Toba, tetapi juga puak-puak lain untuk menciptakan masyarakat Batak-Kristen di Batavia.

Usaha ini telah dirintis sejak akhir dasawarasa kedua abad ke-20, pada 1917 ketika kaum migran Batak-Toba baru sekitar 30 orang (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :214). Ketika itu sebagian di antaranya kerap beribadah di Gereformeerde Kerk Kwitang dan mendapat pembinaan rohani dari Ds. L Tiemersma (Heuken :2003 :197). Setelah beberapa kali berpindah tempat ibadah, atas bantuan Guru Frederik Harahap pada 17 Oktober 1917 disewa tiga buah rumah di perbatasan Sawah Besar dan Kebun Jeruk untuk menampung para jemaat Batak-Toba itu di Batavia (Purba dan Elvis F. Purba, 998 :215). Dalam waktu singkat, jumlah pemuda Batak-Toba yang tinggal di dua rumah itu dari waktu ke waktu semakin bertambah. Pasalnya, hampir setiap bulan datang dua sampai tiga pelajar dari Tanah Batak. Kebanyakan dari mereka datang setelah membaca pengumuman di *Majalah Immanuel* yang dipasang oleh Guru Frederik Harahap. Walaupun sebagian besar dari pelajar Batak-Toba fasih berbahasa Belanda dan memahami bahasa Melayu, namun muncul pula kerinduan untuk berkebakhtian dalam bahasa Batak, seperti yang

---

<sup>16</sup> Perseteruan itu dalam perkembangannya memunculkan kekhawatiran di kalangan tokoh-tokoh migran Batak di Batavia terhadap keadaan ini. Oleh karena itu, atas inisiatif Panangian Harahap berkumpul beberapa kaum tua Batak untuk membicarakan masalah tersebut. Sebagai upaya untuk mengembalikan persatuan migran Batak di Batavia, dalam pertemuan itu disepakatilah pembentukan organisasi *Parsaaan Batak* pada 1 Agustus 1933. Adapun susunan pengurusnya antara lain, F. Harahap (ketua), M. Tambunan (wakil ketua), H. Siregar (sekretaris), S. Hutagalung (bendahara) (Marpaung, 1974 : 16).

kerap dilakukan di kampung halaman. Mereka kemudian bersepakat untuk mengajukan usul untuk mengadakan kebaktian berbahasa Batak kepada Pendeta D.S. Tiemersma.

Usul itu pun akhirnya disetujui. Alasannya, jumlah jemaat Batak yang berkebaktian di Gedung HCS semakin bertambah, sementara kapasitas bangunan tersebut sangat terbatas. Setelah beberapa kali berpindah tempat, dipustuskanlah untuk menyelenggarakan kebaktian di Bybel School yang terletak di daerah Pasar Baru. Pada 20 September 1919, diselenggarakan kebaktian berbahasa Batak pertama di Batavia yang dipimpin oleh Guru Frederik Harahap dan E. Sutan Harahap yang dihadiri lebih kurang 50 orang, termasuk di antaranya Merari Siregar, sastrawan Balai Pustaka, penulis *Azab dan Sengsara* (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :215). Sementara itu, dalam sebuah acara ibadah penguburan anak H. Harahap kebaktian bahasa Batak juga diselenggarakan di bawah arahan E. Sutan Harahap yang menjelma menjadi ibadah mingguan rutin. Sejak minggu pertama Oktober 1919 diadakanlah kebaktian pertama yang dihadiri 20 orang. Beberapa minggu berikutnya, jumlah orang yang hadir semakin banyak, termasuk yang biasanya beribadah di Gereja Methodis dan *Gereformeerde* (Harahap, t.t. :44 ). Beberapa bulan kemudian, E. Sutan Harahap memutuskan untuk keluar dari Seminari Depok dan menjadi pemimpin jemaat Batak yang permanen di kawasan Pintu Besar (Harahap, t.t. :44). Namun sejak November 1919, lokasi kebaktian itu diputuskan untuk dipindahkan ke HIS Kwitang karena berada di daerah rawa-rawa yang tidak baik bagi kesehatan. (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 :215). Momentum perpindahan ke kawasan Kwitang menjadi peristiwa yang penting karena menjadi awal bersatunya jemaat asal Pintu Besar dan Pasar Baru yang belakangan menyusul pindah untuk berkebaktian bersama. Setelah beberapa kali beribadah, mereka bersepakat untuk membentuk kepengurusan dan mengkaji kemungkinan untuk mengajukan permohonan pengakuan serta pengutusan pendeta dari *Huria Kristen Batak* yang dikelola oleh RMG di Tanah Batak. Walaupun sempat ditolak oleh Ephorus Dr. Warneck karena alasan biaya dan menampik tawaran Ds. Temersma untuk mencari pendeta karena menginginkan kebaktian diadakan menggunakan bahasa Batak (Harahap, t.t. : 45), akhirnya RMG tak punya banyak pilihan. Pada Maret 1922, di bawah pembiayaan *Gereformeerde Kerk*, pendeta Mulia Nainggolan menjejakkan kaki di Batavia (*Ibid.*, 1998 : 216).

Segera setelah itu, ia langsung menghadapi berbagai persoalan krusial. Salah satunya adalah tercerai-berainya jemaat Kristen-Batak di Batavia karena ketiadaan pimpinan gereja. Untuk mengatasi hal itu, pendeta Nainggolan mendatangi satu per satu kediaman jemaat Batak untuk mendatan dan mendaftarkan setiap orang-orang Batak-Kristen yang bermukim di Batavia sebagai anggota Huria Kristen Batak Batavia. Upaya yang dilakukan oleh Pendeta Nainggolan ini terbukti cukup berhasil. Dalam beberapa bulan paling tidak telah terdaftar 250 orang anggota Huria Kristen Batak Batavia.

Setelah lima tahun berkarya (1922-1927), pendeta Nainggolan yang memasuki masa pensiun pun digantikan oleh pendeta Peter Tambunan—ayah Menteri Sosial masa Orde Baru, A.M Tambunan. Ia kemudian mengagagas pendirian gedung Gereja Batak pertama di pulau Jawa karena Huria Kristen Batak Batavia telah dilegalisasi berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada 21 Maret 1922 (*Ibid.*, 1998 : 216). Tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan ide ambisius itu. Pasalnya, dana yang dibutuhkan amat besar sementara sebagian besar jemaat Kristen-Batak berstatus pelajar yang belum memiliki penghasilan tetap. Tanpa diduga, dalam sebuah kunjungan perkenalan pendeta baru di daerah Kwitang pada 30 April 1930, Ds. Gow Kian Kiet memberikan sumbangan f500 sebagai modal awal pembangunan gedung gereja Huria Kristen Batak Batavia (Harahap.t.t. :46).

Segera setelah itu, dibentuklah panitia pembangunan gereja<sup>17</sup> untuk menghimpun dana yang bersumber gaji jemaat yang dipotong seperempatnya setiap bulan, *inteekenlijst* dari para pegawai kerah putih, sumbangan dari para pemuda dan pelajar Batak, dan usaha dari para *sintua* untuk mengumpulkan dana dari para tokoh-tokoh Jemaat Kristen terkemuka di Batavia. Di luar itu, dana pembangunan gereja didapatkan dari sumbangan uang kolekte<sup>18</sup> dari jemaat di Tanah Batak dan bantuan dari Dr. Slottonaker de Bruins dan Mr. van Helendragen (Marpaung, 1974 :13). Kerja keras panitia pembangunan gereja selama empat tahun akhirnya berhasil menghimpun dana sebesar f 10.000, yang lebih dari cukup untuk membangun sebuah gedung gereja di Batavia.

Permasalahan lain yang harus dihadapi terkait dengan pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Batavia adalah menetapkan lokasi dan mendapatkan izin mendirikan bangunan dari *burgeermester* (walikota) Batavia. Rencana ini sebenarnya telah diajukan sejak 1926. Namun baru lima tahun kemudian ketika dana pembangunan gereja telah terhimpun, Pendeta Peter Nainggolan secara serius memperhatikan masalah ini. Untuk itu ia mengutus J.K. Panggabean, E. Sutan Harahap, dan St. Henok Silitonga untuk menghadap walikota Batavia. Dalam pertemuan itu akhirnya diputuskan tempat gedung gereja yang akan dibangun berada di Gang Kernolong 37. Segera setelah lokasi dan izin mendirikan bangunan itu diperoleh dimulailah proses pembangunan gedung Gereja Batak pertama di pulau Jawa. Sebagai kontraktor (*aannemer*) ditunjuk J.M. Sitinjak yang tinggal di Jalan Muria Menteng.

Pembangunan gedung gereja itu sendiri dimulai pada 21 November 1931, setelah diadakannya peletakkan batu pertama oleh istri walikota Batavia Ny. Mr. Meyroos dan didampingi oleh Ny. Nelly Harahap. Dalam tempo enam bulan proses pembangunan gedung gereja itu berhasil dirampungkan. Akhirnya setelah 12 tahun mendambakan gedung gereja yang permanen, pada 8 Mei 1932 diadakan peresmian gedung gereja sekaligus ibadah pertama yang dihadiri oleh De Jonge (Gubernur Hindia-Belanda), Mr. A. Meijroos (Walikota Batavia), dan Pendeta Edward Muller (wakil RMG), beberapa pejabat tinggi kolonial, serta wakil lembaga dan gereja Kristen (Purba dan Elvis F. Purba, 1998 : 218 ; Marpaung, 1974 :13).

Bersamaan dengan proses pendirian gereja, terjadi pergolakan yang membuat sebagian orang-orang Batak menuntut otonomi yang lebih luas dalam Gereja Batak yang dimonopoli misionaris RMG. Sebenarnya akar permasalahan Jemaat Batak di Batavia serupa dengan persoalan yang terjadi Tanah Batak. Berkembangnya nasionalisme, memudarnya hegemoni Barat paska Perang Dunia I (1914-1918), dan kematian Nommensen (1918), Walhasil, sebagian mendukung kekuasaan RMG dalam Huria Kristen Batak, sementara yang lainnya mendukung gerakan kemandirian gereja (Aritonang dan Karel Steenbrink, 2008 :548 ; Hasselgren, 2008 : 126). Di Batavia, sejak 1927, sekelompok pemuda dan keluarga Batak Kristen yang mendirikan *Bataksche Christelijke Gemeente* (BCG). Ironisnya, tak lama setelah menyelenggarakan kebaktian perdana pada 10 Juli 1927 dan dihadiri oleh 13 orang, terjadi konflik internal dalam BCG. Ketika RMG berupaya menengahi pertikaian itu, sebagian besar anggota dengan tegas menolak campur tangan pihak luar. Mereka kemudian mendirikan perkumpulan lain yang mengambil nama Punguan Kristen Batak<sup>19</sup> (PKB) sebagai gereja yang mandiri. Setelah membentuk kepengurusan (sinode)

<sup>17</sup> Adapun susunan panitia itu sebagai berikut : Adapun susunan sebagai berikut : Pendeta Tambunan, E. Sutan Harahap, T. Sutan Gunung Mulia, J.M. Panjaitan, H. Tambunan, M. Siregar, Ph. Siregar, M. Siregar, S. Marpaung, W.O. Simangunsong, dan H. Silitonga

<sup>18</sup> Sumbangan sukarela (persembahan) yang diserahkan oleh jemaat dalam setiap pelaksanaan kebaktian.

<sup>19</sup> Beberapa pionir PKB termasuk para penantau Batak awal yang sukses di Batavia, seperti J.K. Panggabean, Gr. Paul Lumbantobing, I. Lumbantobing, St. D. Hutagalung (datang ke Batavia bersama iparnya R.J. Sihite pada 1914) , Panggabean (lebih dikenal dengan nama Ama ni Uli, penulis buku pelajaran Tata Buku pada awal kemerdekaan).

yang berkantor di Restoran Terry (sekarang terletak di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.96) yang kemudian diubah menjadi gedung gereja (Aritonang, 2007 :11), PKB pun mengembangkan jaringan hingga ke Palembang dan bahkan memasuki Tanah Batak.

Akan tetapi di tengah konflik itu, jemaat Huria Kristen Batak Batavia yang berbasis di Gang Kernolong tetap dapat berkembang. Sampai akhir masa kolonial hingga awal masa kemerdekaan—kecuali pada masa pendudukan Jepang—dari tahun ke tahun jumlah anggotanya terus meningkat<sup>20</sup> Purba dan Elvis F. Purba,1998 :220). Selain itu solidaritas di antara Jemaat Huria Kristen Batak Batavia semakin kuat, terutama pada masa-masa sulit<sup>21</sup> dan sehingga memiliki peran penting dalam Sinode Godang HKBP<sup>22</sup> pada 1940 yang memutuskan pengambilalihan kekuasaan dari para misionaris RMG ke tangan pendeta Batak (Situmorang,1981 :71 ; Purba dan Elvis F. Purba, 1998 : 219 ; Aritonang dan Karel Steenbrink, 2008 :550-551). Selain itu, ketika gereja Kernolong menjadi pusat distrik VIII Jawa-Kalimantan yang mencakup pulau Jawa, Sumatera Selatan, dan Indonesia Timur yang dipimpin oleh pendeta Melanton Pakpahan (Nainggolan,2006 :231). Setelah proklamasi kemerdekaan hingga pertengahan 1950-an, gereja Kernolog yang telah direnovasi dan ditingkatkan kapasitasnya hingga dua kali lipat merupakan tempat ibadah tunggal<sup>23</sup> yang dimiliki jemaat HKBP di Jakarta (Heuken, 2003 : 197).

## Penutup

Kehadiran kaum migran Batak-Toba di Batavia sepanjang paruh pertama abad ke-20 bukan sekadar kisah perpindahan penduduk antar-wilayah di tanah koloni. Kiprah mereka di Ibukota Hindia-Belanda juga merupakan perjuangan membentuk citra sebagai kaum Bumiputera terpelajar dalam masyarakat urban yang multikultur. Pada mulanya, berbagai puak bersatu-padu untuk menyokong identitas Kebatakan untuk mengikis berbagai stereotip negatif terhadap kelompok etnik ini dan menyejajarkan diri dengan pelajar-pelajar perantau dari berbagai wilayah di Nusantara yang lebih dulu mapan dalam konteks kehidupan intelektual Bumiputera di Batavia. Setelah tujuan itu tercapai para pelajar Batak di Batavia mulai menegaskan identitas budayanya melalui pembentukan berbagai organisasi berbasis etnis, seperti yang dilakukan oleh pemuda-

---

Namun sejak Gereja Kernolong berdiri, beberapa tokoh PKB pun lebih memilih masuk ke Huria Kristen Batavia, seperti J.K. Panggabean (Aritonang dan Karel Steenbrink, 2008 :549) ).

<sup>20</sup> Pada 1939, jumlah jemaat Huria Kristen Batak Batavia telah mencapai 725 jiwa. Sementara pada awal masa kemerdekaan, populasi jemaat Gereja Kernolong meningkat kembali menjadi 1.042 jiwa pada 1948 dan 1.319 jiwa pada tahun berikutnya. Brunner bahkan memperkirakan jumlah yang lebih besar pada 1949, yaitu 2.650 jiwa (Purba dan Elvis F. Purba,1998 :220).

<sup>21</sup> Pada masa pendudukan Jepang, misalnya, jemaat gereja Kernolong membentuk lembaga sosial beralamat di Jalan Tomas (daerah Petojo sekarang) untuk menampung banyak orang Batak yang mengalami kesulitan. Selain itu, beberapa anggota Huria Kristen Batak Batavia pun memberikan tumpangan kepada para anggota jemaat Gereja Kernolong lain yang kehilangan tempat tinggal (Situmorang,1981 :71 ; Purba dan Elvis F. Purba, 1998 : 219 ).

<sup>22</sup> Peristiwa ini terjadi karena para zending RMG menunda pelimpahan kekuasaan kepada pendeta-pendeta lokal dalam kepengurusan Gereja Batak. Oleh karena itu para pendeta Batak mulai bergerak untuk mempercepat penyerahan kekuasaan itu dan mendapatkan momentum penting ketika Pemerintah Hindia-Belanda mulai menawan dan mendeportasi para zending RMG sejak 10 Mei 1940 akibat pendudukan Jerman atas Belanda dalam Perang Dunia II. Tepat sebulan setelah peristiwa itu, pada 10-11 Juli 1940 para pendeta Batak mengorganisasi Sinode Godang. Pencapaian utama dalam peristiwa itu adalah terpilihnya Ephorus Batak pertama, Pendeta Kasianus Sirait dan penataan organisasi gereja Huria Kristen Batak Protestan. Sejak saat itu Gereja Batak mengambil sikap untuk menolak intervensi dari siapa pun, termasuk kelompok zending Eropa. Sikap itu, misalnya, ditunjukkan ketika Gereja Batak menolak keputusan Pemerintah Hindia-Belanda, untuk mengambil alih segala kegiatan, tanggung jawab, dan aset-aset RMG melalui lembaga Batak Niaz Zending (BNZ) (Aritonang dan Karel Steenbrink, 2008 :550-551).

<sup>23</sup> Baru pada pertengahan 1950-an diputuskan untuk mendirikan gereja baru, di Kebayoran Baru dan Tanjung Priok. Sampai dasawarsa 1960-an setidaknya telah terdapat enam belas gereja HKBP di Jakarta (Heuken, 2003 :197).



pemuda Buimputera lain yang menjadi salah satu lokomotif pergerakan nasional yang mengugat kekuasaan kolonial di Hindia-Belanda.

Namun demikian, pada saat yang bersamaan, penegasan identitas kultural itu justru menyebabkan melunturnya solidaritas antar puak Batak itu sendiri. Alih-alih digunakan untuk kepentingan bersama, identitas kebatakan kini didominasi orang-orang Batak-Toba. Walhasil, terjadi penolakan dari puak-puak lain terhadap identitas kultural ini karena berbagai sebab. Walaupun dilakukan sejumlah upaya rekonsiliasi, namun hingga akhir masa kolonial identitas kebatakan lekat dengan puak Batak-Toba yang mulai mendirikan batasan-batasan baru yang ketat berdasar parameter geografis, agama, dan kekerabatan (marga) yang terus bertahan hingga saat ini. Akibatnya, segmentasi antara puak-puak dalam suku Batak kian menguat dari waktu ke waktu sehingga mereka lebih cenderung menekankan berbagai perbedaan dan mereduksi persamaan untuk menegaskan kekhasan masing-masing identitas kultural .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Abineno, Johannes Ludwig Chrysostomus (1978). *Sejarah Apostolat di Indonesia*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Alkatiri, Zeffry J. (2010) *Pasar Gambir, Komik Cina dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-an*. Masup Jakarta, Depok.
- Aritonang, Herbert (2007). "GKPB Menteng, Merayakan HUT ke-80". *Reformat* Edisi 67 September Minggu II.
- Aritonang, Jan S. (1988). *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak: Suatu Telaah Historis-Teologis atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zending (Khususnya RMG) di Bidang Pendidikan 1861-1940*. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Aritonang, Jan Sihar, dan Karel Adriaan Steenbrink (Eds.) (2008). *A History of Christianity in Indonesia*. Brill, Leiden.
- Azhari, Ichwan (2007). "Etnonasionalisme: Tantangan Kebangsaan Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan *Musyawaharh Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Sumatera Utara*.
- Bridge, Gary, and Sophie Watson (Eds) (2003). *A Companion to the City*. Blackwell Publishers, Oxford. 2003.
- Bruner, Edward M. (1961) "Urbanization and ethnic identity in North Sumatra." *American Anthropologist* 63 (3). hal 508-521.
- Castles, Lance. (1967) "The Ethnic Profile of Djakarta." *Indonesia* 3. hal. 153-204.
- Castles, Lance. (2001). *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Dutt, Ashok K., dan Naghun Song. (1994). "Urbanization in Southeast Asia." Ashok K. Dutt. *The Asian City: Processes of Development, Characteristics and Planning*. Springer, tanpa kota.
- Harahap, E. Sutan. (2008). *Hikajat Perdjalanannya Indjil di Tanah Batak*. t.p., Batavia.t.t. Hasselgren, Johan. *Batak Toba di Medan: Perkembangan Identitas Etno-Religius Batak Toba di Medan (1912-1965)*. Bina Media, Medan.
- Hutchison, Raydan Jerome Krase (Eds.) (2007). *Ethnic Landscapes in an Urban World*. JAI Press, Oxford.
- Kozok, Uli. (2009) *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak: Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangaraja XII*. École française d'Extrême-Orient dan Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Latuihamallo, Peter D. (2004). *Hogere Theologische School: Awal Pendidikan Tinggi Teologi di Indonesia*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Legge, John David. (2010). *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta*. Equinox Publishing, Shenton.
- Lefebvre, Henri. (2003). *The Urban Revolution*. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Lombard, Denys. (2000). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bagian I Batas-Batas Pembaratan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lubis, Firman. (2008). *Jakarta 1950-an: Kenangan Semasa Remaja*. Masup Jakarta, Depok.

- Lumban Gaol, Hotman J (14 April 2015). “Jong Batak Lahir dari Cinta Kasih ‘Haholongan’”.. [https://www.kompasiana.com/hotman/jong-batak-lahir-dari-cinta-kasih-haholongan\\_5535ac2f6ea834bflcda42e5](https://www.kompasiana.com/hotman/jong-batak-lahir-dari-cinta-kasih-haholongan_5535ac2f6ea834bflcda42e5).
- Marpaung, S.M. (1974). *Orientasi Nilai Budaya pada Orang Batak Toba di Kelurahan Setia Budi dan Tomang*. Skripsi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Matondang, M.H. (2003) *Masyarakat Batak di Jakarta: Pilihan Kerja dan Kekerabatannya*. Borbor, Jakarta.
- Nainggolan, Togar. (2006) *Batak Toba di Jakarta: Kontinuitas dan Perubahan Identitas*. Bina Media, Medan.
- Nas, Peter J.M.(Ed.) (2005) *Directors of Urban Change in Asia*. Routledge, London dan New York.
- Pringgogidgo, A.K. (1991) *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Purba, O.H.S dan Elvis F. Purba (1998). *Migrasi Batak Toba di Luar Tapauli Utara: Suatu Deskripsi*. Monora, Medan.
- Pelly, Usman. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi budaya Minangkabau dan Mandailing*. LP3S, Jakarta.
- Perret, Daniel (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- “Sastrawan Pujangga Baru”. 14 November 2008. <https://tokoh.id/biografi/1-ensiklopedi/sastrawan-pujangga-baru>.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius (2005). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi, dan Budaya Politik*. Obor, Jakarta.
- Simatupang, T.B. (1991) *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos: Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa, dan Negara*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Sirait, P. H., R. Hindrayati, Rheinhardt. *Pram Melawan. Nalar*, Jakarta. 2011.
- Situmorang, Sitor. (1981). *Sitor Situmorang Seorang Sastrawan 45 Penyair Danau Toba*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Suwardi, Edi. (2007). *Jong Sumatranen Bond: Dari Nasionalisme Etnik Menuju Nasionalisme indonesia (1917-1931)*. Tesis. Unversitas Indonesia, Depok.
- Van Miert, Hans (2003). *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Indonesia, 1918-1930*. Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu-KITLV, Jakarta.
- Van den End, Theodore, dan J. Weitjens (1993). *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an-Sekarang*. Gunung Mulia, Jakarta.